ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI SUB DAS BENDUNG DAERAH SEKIP JAYA KOTA PALEMBANG

Azzahra Salsabila Putri Rahman[1], Lintang Cahya Damarindah [2], Nadjuah Dika Apriliani [3], Putri Lumbantoruan[4], Sheren Marsella[5], Galuh Efnol Adzan[6]

[1,2,3,4,5,6]*Universitas Sriwijaya*
E-mail: azzahrasalsabilapr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa permasalahan banjir di kawasan Sub DAS Bendung Kelurahan Sekip Jaya, Kota Palembang, lebih dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah dibandingkan keterbatasan infrastruktur drainase. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman serta kerangka analisis kebijakan publik Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi sampah secara langsung menyebabkan penyumbatan saluran drainase dan menurunkan kapasitas aliran air, sehingga memicu banjir meskipun curah hujan berada pada kategori sedang. Evaluasi kebijakan mengindikasikan bahwa Program Sampah Tukar Sembako lebih efektif dan responsif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dibandingkan program edukasi lingkungan. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan berbasis insentif dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi banjir perkotaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci : *Banjir Perkotaan; Pengelolaan Sampah; Ketidakpatuhan Masyarakat; Kebijakan Publik; Sub DAS Bendung*

ABSTRACT

This study aims to demonstrate that flooding in the Sub-Watershed (Sub DAS) Bendung area of Sekip Jaya Urban Village, Palembang City, is driven primarily by low public compliance in household waste management rather than by limitations in drainage infrastructure. A qualitative case study approach was employed, using field observations, semi-structured interviews, and document analysis. Data were analyzed using the Miles and Huberman qualitative analysis model and Dunn's public policy analysis framework. The findings indicate that the accumulation of household waste directly obstructs drainage channels, reduces water flow capacity, and triggers flooding even under moderate rainfall conditions. Policy evaluation results show that the "Waste-for-Basic-Needs" (Sampah Tukar Sembako) program is more effective and responsive in increasing community participation than environmental education programs alone. These findings underscore the importance of incentive-based and community-centered waste management policies as a strategic approach to sustainable urban flood mitigation.

Keywords : *Urban Flooding; Household Waste Management; Public Compliance; Public Policy; Sub-Watershed Bendung*

PENDAHULUAN

Banjir di kawasan perkotaan sering kali muncul pada wilayah permukiman yang berada di sekitar sungai dan saluran drainase, terutama ketika sistem aliran air tidak lagi berfungsi secara optimal. Di banyak kota, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah masuknya sampah ke badan sungai dan jaringan drainase. Sampah yang terakumulasi mempersempit penampang aliran dan mempercepat sedimentasi, sehingga air hujan tidak dapat dialirkan dengan lancar dan mudah meluap ke lingkungan permukiman . Dalam kondisi seperti ini, intensitas hujan bukan satu-satunya faktor penentu terjadinya banjir, karena persoalan pengelolaan sampah berperan besar dalam membentuk kerentanan wilayah (Rahalsyah Putra et al., 2023). Pola tersebut juga ditemukan di Kota Palembang, khususnya di kawasan Sub DAS Bendung Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning. Wilayah ini berada pada jalur aliran air permukaan yang bermuara ke Sungai Musi dan berfungsi sebagai bagian dari sistem drainase perkotaan. Ketika aliran pada sub-DAS ini terganggu, genangan dengan cepat muncul di kawasan permukiman sekitarnya. Peta Sebaran Banjir Kota Palembang menunjukkan bahwa Kelurahan Sekip Jaya termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan banjir sedang yang berada di sekitar aliran Sub DAS Bendung (Bappeda Litbang Kota Palembang, 2022).

Kondisi lapangan memperlihatkan bahwa beban sampah di sepanjang aliran Sub DAS Bendung tergolong tinggi. Pada Juli 2025, kegiatan aksi bersih Sungai Sekip Bendung dilaporkan berhasil mengangkat sekitar tiga ton sampah dari badan sungai, yang menunjukkan bahwa akumulasi material padat telah berlangsung dalam waktu lama dan berkontribusi terhadap penyempitan alur sungai ((Rakyat Pembaruan, 2025). Situasi ini sejalan dengan pernyataan Pemerintah Kota Palembang yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah saluran air yang tidak berfungsi secara maksimal, sehingga laju aliran permukaan menjadi sangat lambat (Hartati, 2025). Berbagai upaya fisik telah dilakukan pemerintah daerah, seperti pengerukan saluran dan perbaikan drainase. Namun demikian, kejadian banjir masih tercatat hingga tahun 2025. Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang juga mencatat bahwa kejadian banjir masih terjadi di sejumlah kawasan perkotaan, termasuk di wilayah Kecamatan Kemuning. Beberapa titik genangan dilaporkan berada di kawasan Sekip, yang menunjukkan bahwa wilayah ini masih termasuk area yang rentan terhadap banjir(Agustin, 2025), pada Maret 2025, hujan deras dilaporkan menyebabkan genangan di kawasan Bendungan dengan ketinggian air mencapai 10–15 cm yang secara langsung mengganggu aktivitas masyarakat (Pramana, 2025)

Data curah hujan tahunan di wilayah Sub DAS Bendung Kelurahan Sekip Jaya menunjukkan bahwa intensitas hujan berada pada kategori sedang, dengan kisaran 2.001–2.500 mm/tahun (Putri, 2025), fakta ini memperkuat argumen bahwa banjir yang terjadi tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor alam. Dalam kajian bencana, banjir dipahami sebagai hasil interaksi antara proses alam dan kondisi sosial yang membentuk tingkat kerentanan suatu wilayah, bukan sebagai peristiwa alamiah yang berdiri sendiri (Smith, 2006)Masuknya sampah ke saluran drainase dan badan sungai tidak terlepas dari perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kebersihan saluran lingkungan di sekitar Sub DAS Bendung Kelurahan Sekip Jaya masih belum optimal, dengan penumpukan material padat yang dijumpai di beberapa titik. Kondisi ini mencerminkan praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai serta lemahnya konsistensi pengelolaan lingkungan di tingkat lokal(Putri, 2025), situasi tersebut turut memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap respons pemerintah dalam pengelolaan

lingkungan dan perbaikan infrastruktur drainase. Akumulasi sampah yang bercampur dengan sedimen berdampak langsung pada meningkatnya genangan dan banjir yang mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi warga. Selain merusak lingkungan permukiman, genangan air juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan air tercemar. Oleh karena itu, banjir di kawasan Sub DAS Bendung Kelurahan Sekip Jaya dapat dipahami sebagai konsekuensi dari permasalahan sampah yang tidak dikelola secara konsisten.

Permasalahan banjir di kawasan Sub DAS Bendung Kelurahan Sekip Jaya tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh keterbatasan infrastruktur drainase. Faktor yang lebih menentukan terletak pada rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sampah yang terus masuk ke saluran air dan badan sungai menyebabkan penurunan kapasitas drainase secara berulang, sehingga intervensi teknis yang dilakukan cenderung bersifat sementara dan tidak mampu menekan risiko genangan secara berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan bahwa banjir di kawasan perkotaan merupakan hasil dari interaksi antara perilaku masyarakat dan kegagalan pengelolaan lingkungan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa permasalahan banjir dan degradasi kualitas lingkungan di kawasan perkotaan berkaitan erat dengan tekanan aktivitas manusia di daerah aliran sungai (DAS). Studi pada skala sub-DAS di Indonesia mengungkapkan bahwa pencemaran sungai dipengaruhi secara signifikan oleh aktivitas domestik, industri, serta pengelolaan sampah yang belum optimal, sehingga menurunkan kualitas air dan meningkatkan risiko permasalahan lingkungan di wilayah hilir (Juwana et al., 2024) . Selain itu, (Edison et al., 2025)menegaskan bahwa permasalahan DAS tidak hanya dipicu oleh faktor biofisik dan infrastruktur, tetapi juga oleh lemahnya koordinasi antarlembaga serta rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan DAS. Sementara itu, kajian kebijakan oleh (Darniyus et al., 2025) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di DAS di Indonesia masih didominasi pendekatan teknokratis dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi perilaku masyarakat dalam perumusan kebijakan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas pencemaran DAS, pengelolaan sampah, dan kualitas lingkungan secara terpisah, tanpa secara spesifik mengaitkan akumulasi sampah dengan penanganan banjir pada skala sub-DAS perkotaan melalui analisis alternatif kebijakan. Oleh karena itu, kajian empiris yang mengintegrasikan pengelolaan sampah, perilaku masyarakat, dan penanganan banjir dalam kerangka analisis kebijakan pada konteks sub-DAS perkotaan masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengelolaan sampah dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap terjadinya banjir di kawasan Sub DAS Bendung Kelurahan Sekip Jaya. Analisis diarahkan pada hubungan antara akumulasi sampah, penurunan kapasitas drainase, dan dampak banjir dalam kerangka kebijakan publik. Kajian ini juga dikaitkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 6 mengenai air bersih dan sanitasi serta SDG 11 mengenai kota dan permukiman berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis permasalahan banjir di kawasan Sub DAS Bendung Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang dengan batas geografis pada kisaran koordinat **2°57'39.5" LS–104°45'14.9" BT hingga 2°58'13.0" LS–104°45'39.9" BT**. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kondisi empiris di lapangan yang berkaitan dengan

pengelolaan sampah, tingkat ketidakpatuhan masyarakat, serta dampaknya terhadap terjadinya banjir di kawasan permukiman.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan warga Kelurahan Sekip Jaya. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik saluran drainase, kebersihan lingkungan, serta keberadaan dan akumulasi sampah di sekitar aliran Sub DAS Bendung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengelolaan sampah, perilaku masyarakat, serta pandangan mereka terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan infrastruktur drainase. Teknik pengumpulan data ini sejalan dengan metode penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh (Ishtiaq, 2019) dan Sugiyono (2016). Data sekunder diperoleh dari laporan instansi pemerintah, dokumen regulasi, jurnal ilmiah, serta media daring yang relevan dengan permasalahan banjir dan pengelolaan sampah. Penggunaan dokumen sebagai sumber data sekunder dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat data primer, sesuai dengan penjelasan Neuman (2011) mengenai pemanfaatan dokumen dalam penelitian sosial.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti prinsip analisis data Miles dan Huberman (1994), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan temuan empiris hasil observasi dan wawancara, serta mengidentifikasi pola hubungan antara pengelolaan sampah, ketidakpatuhan masyarakat, dan terjadinya banjir di kawasan penelitian. Selain analisis empiris, penelitian ini juga menggunakan kerangka analisis kebijakan publik sebagai alat bantu analitis untuk membahas implikasi kebijakan dari temuan penelitian. Kerangka ini mengacu pada tahapan analisis kebijakan yang dikemukakan oleh (Dunn, 2018), yang mencakup penataan masalah, perumusan alternatif kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Penggunaan kerangka analisis kebijakan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai metode pengambilan keputusan kebijakan, melainkan sebagai pendekatan analitis untuk membaca dan membahas hasil penelitian dalam konteks kebijakan

Penataan masalah dilakukan melalui analisis batas (*boundary analysis*) untuk membatasi ruang lingkup permasalahan pada isu banjir yang disebabkan oleh penyumbatan drainase, sedimentasi, dan pengelolaan sampah di kawasan Sub DAS Bendung Kelurahan Sekip Jaya. Pembatasan ini dilakukan agar analisis penelitian tetap terfokus dan tidak melebar ke faktor lain di luar temuan utama penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dibatasi tersebut, alternatif kebijakan dirumuskan melalui telaah pustaka (*literature review*) terhadap penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan sampah, mitigasi banjir, dan penguatan kapasitas daerah aliran sungai. Telaah pustaka ini digunakan sebagai dasar konseptual untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan kebijakan yang relevan dengan kondisi empiris di lapangan, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian sosial (Ishtiaq, 2019)Neuman, 2011).

Alternatif kebijakan yang telah diidentifikasi dianalisis secara komparatif dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Dunn, 2018), meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kepantasan. Analisis komparatif ini dilakukan secara kualitatif sebagai alat untuk memahami kekuatan dan keterbatasan masing-masing alternatif kebijakan, tanpa dimaksudkan untuk menentukan atau memilih kebijakan terbaik. Pendekatan perbandingan ini sejalan dengan metode analisis kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Subarsono (2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan banjir di kawasan Sub DAS Bendung Kelurahan Sekip Jaya tidak berakar pada persoalan pengelolaan sampah yang belum berjalan secara patuh dan berkelanjutan. Meskipun layanan pengangkutan sampah berbayar telah tersedia, sebagian masyarakat enggan berlangganan karena menganggap iuran sebagai beban tambahan. Kondisi ini mendorong munculnya pilihan pembuangan sampah ke sungai, parit, dan saluran drainase sebagai cara yang dianggap lebih praktis dan tidak berbiaya. Pola tersebut berlangsung secara berulang dan membentuk kebiasaan di tingkat lingkungan, sehingga sampah terus masuk ke badan Sub DAS dan jaringan drainase. Di sisi lain, mekanisme pengelolaan sampah yang ada masih cenderung bersifat administratif dan belum disertai pendekatan sosial yang mampu menumbuhkan kepatuhan serta keterlibatan kolektif masyarakat secara konsisten. Akibatnya, penumpukan sampah terus terjadi dan dalam jangka panjang menurunkan kapasitas alir sungai, sebagaimana tercermin dari kegiatan pembersihan Sungai Sekip Bendung pada Juli 2025 yang berhasil mengangkat sekitar tiga ton sampah dan menunjukkan tingginya beban sampah yang telah lama menghambat aliran air (Rakyat Pembaruan, 2025)

Penumpukan sampah di badan Sub DAS Bendung Sekip Jaya dan jaringan drainase menimbulkan dampak langsung terhadap menurunnya kapasitas alir sungai dan saluran air. Kajian teknis di kawasan Sekip Jaya menunjukkan bahwa sejumlah saluran drainase mengalami penyempitan akibat endapan sedimen dan sampah, sehingga tidak mampu menampung limpasan air hujan. Kondisi ini menyebabkan air hujan yang seharusnya dialirkan menuju sungai utama justru meluap ke kawasan permukiman dan memicu genangan serta banjir yang berulang, bahkan pada hujan dengan intensitas menengah. Dampak banjir tersebut tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga berimplikasi luas terhadap infrastruktur, sosial-ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dari sisi infrastruktur, banjir mengganggu fungsi jalan lingkungan, merusak fasilitas umum, serta meningkatkan kebutuhan pemeliharaan drainase secara berulang tanpa menyentuh penyebab utamanya (Marzuki, 2020). Dari aspek sosial dan ekonomi, genangan yang berulang menghambat aktivitas bekerja, bersekolah, dan usaha kecil masyarakat, sehingga menurunkan produktivitas dan meningkatkan kerugian rumah tangga, terutama di kawasan permukiman yang berada pada zona rawan genangan (Widyawati & Putra Usman, 2025). Sementara itu, dari sisi kesehatan dan lingkungan, genangan air yang bercampur dengan sampah berpotensi menjadi media penyebaran penyakit berbasis lingkungan dan memperburuk kualitas ekosistem perairan Sub DAS Bendung Sekip Jaya (Anthony et al., 2025)

Berdasarkan hasil analisis permasalahan di Kelurahan Sekip Jaya, diketahui bahwa penyebab utama banjir dan genangan di kawasan tersebut bukan karena kapasitas infrastruktur yang kurang memadai, melainkan akibat penumpukan sampah. Permasalahan ini muncul karena rendahnya kesadaran warga dalam membuang sampah pada tempatnya serta enggannya masyarakat membayar jasa pengangkutan sampah, meskipun sudah tersedia petugas kebersihan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Siregar et al., 2019)mengenai pengelolaan rawa perkotaan di Palembang, yang menegaskan bahwa **upaya pencegahan banjir perlu dimulai dengan mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.** Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan kebijakan yang tidak hanya menertibkan perilaku masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat langsung sehingga warga termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui proses brainstorming dan pengkajian terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Sekip Jaya, dihasilkan dua alternatif kebijakan yang dinilai

paling potensial dan realistis untuk diimplementasikan dalam konteks lokal dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, kecakupan, kesetaran, responsivitas, kepantasan (Dunn, 2018)

Alternatif pertama adalah program sampah tukar sembako (*waste for basic needs*) **Esensi kebijakan** Program ini merupakan kebijakan berbasis **insentif ekonomi langsung** yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Melalui sistem ini, warga didorong untuk **mengumpulkan dan menyetorkan sampah anorganik** (seperti plastik, botol, kertas, dan logam) di titik pengumpulan atau *Drop-off Point (DOP)* yang tersedia di setiap RW. Alternatif kebijakan ini didasarkan pada wawancara dengan warga Sekip Jaya, yang menunjukkan rendahnya kemauan membayar iuran sampah namun tingginya minat pada program dengan manfaat langsung. Program "Sampah Tukar Sembako" merupakan kebijakan berbasis insentif sosial-ekonomi yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui program ini, warga didorong untuk mengumpulkan dan menyetorkan sampah anorganik ke Drop-off Point (DOP) di setiap RW, yang kemudian ditukar dengan paket kebutuhan pokok sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan. Alternatif kebijakan ini disusun berdasarkan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah masih belum merata, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif. Sebagai inspirasi empiris, kegiatan penukaran sampah dengan sembako telah dipraktikkan di Kota Semarang pada tingkat kelurahan sebagai bagian dari aktivitas sosial dan lingkungan yang bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah" (Nurikhsan, 2025).

Secara normatif, program ini berlandaskan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui mekanisme insentif. Praktik serupa telah diterapkan di Kota Semarang sebagai bagian dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, yang memungkinkan pengelolaan sampah berbasis partisipasi dan insentif di tingkat daerah. Berbeda dengan Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Sampah Sejenis Sampahtelah memiliki regulasi pengelolaan sampah, namun pengaturan mengenai mekanisme insentif belum dirumuskan secara spesifik. Oleh karena itu, Program "Sampah Tukar Sembako" diposisikan sebagai usulan kebijakan adaptif yang tidak hanya merujuk pada praktik baik daerah lain, tetapi juga menjadi dasar argumentatif bagi penguatan kebijakan daerah di Kota Palembang terkait pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. **Cara kerja secara umumnya ialah** Setiap warga yang menyetorkan sampah akan memiliki **kartu tabungan sampah** atau sistem pencatatan digital sederhana. Berat sampah yang dikumpulkan akan dicatat oleh **kader lingkungan** atau petugas kelurahan. Jika akumulasi berat sampah warga mencapai **5 kilogram**, mereka akan mendapatkan **paket sembako** yang disediakan oleh kelurahan melalui dana dari dinas lingkungan hidup kebersihan, hasil penjualan sampah daur ulang dan mitra lokal. Skema ini menciptakan **hubungan timbal balik** antara warga dan pemerintah: masyarakat berpartisipasi aktif menjaga kebersihan, sementara pemerintah memberikan manfaat sosial-ekonomi sebagai penghargaan. Selain mendorong perilaku positif,

kebijakan ini juga membantu **mengurangi volume sampah yang dibuang sembarangan**, sekaligus **meningkatkan solidaritas sosial** di antara warga.

Alternatif kedua yaitu program Edukasi Lingkungan dan Kompetisi RT Bersih. **Esensi kebijakan** Program ini menekankan pada **pembangunan kesadaran dan budaya kebersihan lingkungan** melalui kegiatan edukatif dan kompetisi sosial. Kebijakan ini berfokus pada pembentukan nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab bersama, dan partisipasi kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan literatur, program edukasi lingkungan dan lomba kebersihan efektif meningkatkan partisipasi masyarakat. **pengetahuan dan kesadaran diri warga** mendorong keterlibatan dalam menjaga kebersihan melalui edukasi dan aktivitas sosial (Firdaus et al., 2023.) **kompetisi kebersihan dengan penghargaan simbolik dan sosialisasi rutin** dapat membentuk budaya gotong royong dan tanggung jawab kolektif (Irawanti et al., 2013). Dengan demikian, Alternatif 2: Program "Edukasi Lingkungan dan Kompetisi RT Bersih" dapat diterapkan untuk membangun kesadaran jangka panjang di Sekip Jaya. **Cara kerja secara umumnya** Program dilaksanakan melalui **edukasi langsung dan lomba kebersihan antar-RT** yang diselenggarakan oleh kelurahan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), setiap RT dinilai berdasarkan indikator seperti:

1. Kebersihan jalan dan saluran air,
2. Pengelolaan sampah,
3. Partisipasi warga dalam kegiatan lingkungan, dan
4. Estetika serta penghijauan wilayah.

RT yang memperoleh nilai tertinggi akan diberikan **penghargaan simbolik** seperti piagam, alat kebersihan, atau bantuan fasilitas publik. Selain itu, dilakukan **sosialisasi rutin dan penyuluhan lingkungan** di sekolah serta pertemuan warga untuk memperkuat perilaku sadar sampah. Kebijakan ini bersifat **non-ekonomi**, sehingga lebih berorientasi pada pembentukan **perilaku dan kesadaran jangka panjang**. Walaupun dampaknya tidak secepat program *Sampah Tukar Sembako*

Dalam analisis perbandingan alternatif kebijakan**, Program Sampah Tukar Sembako** dan **Program Edukasi Lingkungan dan Kompetisi RT Bersih** sama-sama diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah yang masuk ke saluran air, namun keduanya memiliki kelebihan dan keterbatasan yang berbeda sesuai pendekatan kebijakannya. Program Sampah Tukar Sembako memiliki keunggulan utama pada kemampuannya mendorong **partisipasi masyarakat secara cepat**. Pemberian insentif berupa sembako menjadikan program ini menarik bagi warga karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Kondisi ini sangat relevan dengan karakteristik masyarakat yang dalam narasi disebutkan memiliki **minat tinggi terhadap program dengan keuntungan nyata**, tetapi relatif rendah dalam kemauan membayar iuran sampah. Dampak positif dari program ini adalah berkurangnya sampah anorganik yang dibuang ke saluran drainase dalam waktu singkat, sehingga berpotensi menekan risiko banjir dalam jangka pendek. Namun demikian, program ini juga memiliki keterbatasan. Ketergantungan pada insentif ekonomi menyebabkan keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan dukungan pihak lain, seperti pemerintah daerah atau mitra CSR. Apabila insentif tidak lagi diberikan, terdapat risiko penurunan partisipasi masyarakat. Selain itu, program ini memerlukan sistem pengelolaan yang rapi, mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga distribusi sembako, sehingga membutuhkan sumber daya yang relatif lebih besar. Sementara itu, Program Edukasi

Lingkungan dan Kompetisi RT Bersih memiliki keunggulan pada aspek **keberlanjutan perubahan perilaku**. Melalui edukasi, sosialisasi, dan kompetisi antar-RT, program ini berupaya menanamkan kesadaran lingkungan dan rasa tanggung jawab kolektif masyarakat dalam jangka panjang. Pendekatan ini tidak terlalu bergantung pada insentif materi, sehingga relatif lebih ringan dari sisi pembiayaan dan lebih stabil untuk diterapkan secara berkelanjutan. Program ini juga berpotensi memperkuat kohesi sosial antarwarga melalui kegiatan bersama di tingkat lingkungan. Namun, keterbatasan utama dari program edukasi terletak pada **lambatnya dampak yang dihasilkan**. Perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu dan konsistensi, sehingga program ini kurang responsif dalam menjawab permasalahan banjir yang bersifat mendesak dan terjadi berulang setiap musim hujan. Partisipasi masyarakat pada tahap awal juga cenderung fluktuatif, terutama jika tidak disertai dengan stimulus yang kuat. Secara keseluruhan, perbandingan pro dan kontra tersebut menunjukkan bahwa Program Sampah Tukar Sembako lebih unggul dalam memberikan dampak cepat dan meningkatkan partisipasi awal masyarakat, sementara Program Edukasi Lingkungan dan Kompetisi RT Bersih lebih kuat dalam membangun keberlanjutan perilaku jangka panjang. Oleh karena itu, dalam narasi tugas kamu, perbedaan kelebihan dan keterbatasan ini menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas kebijakan.

Penilaian alternatif kebijakan dilakukan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kepantasan. Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu mengurangi permasalahan sampah dan banjir, efisiensi menilai perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan manfaat yang dihasilkan, kecukupan menilai kemampuan kebijakan dalam menjawab akar permasalahan, kesetaraan menilai pemerataan manfaat kebijakan bagi seluruh masyarakat, responsivitas menilai kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat, serta kepantasan menilai kesesuaian kebijakan dengan nilai sosial dan regulasi yang berlaku. Pemberian skor dilakukan dalam rentang 1–5, di mana skor 1 menunjukkan kinerja kebijakan yang sangat rendah dan hampir tidak memberikan dampak, skor 2 menunjukkan dampak yang masih terbatas, skor 3 menunjukkan kemampuan kebijakan yang cukup namun belum optimal, skor 4 menunjukkan kinerja kebijakan yang baik dan relatif efektif, serta skor 5 menunjukkan kinerja kebijakan yang sangat baik, tepat sasaran, dan berpotensi berkelanjutan.

Tabel 1. Hasil evaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria Dunn (2018)

Kriteria Evaluasi	Skala 1–5	Alternatif 1: Sampah Tukar Sembako	Alternatif 2: Edukasi & Kompetisi RT Bersih	Penjelasan Perbandingan
Efektivitas	1–5	5	3	Program Tukar Sembako langsung mengubah perilaku karena memberi insentif nyata. Edukasi efektif, tetapi hasilnya bertahap dan butuh waktu lama.
Efisiensi	1–5	4	4	Program Tukar Sembako butuh biaya lebih besar,

				tetapi hasilnya cepat. Edukasi hemat biaya, tetapi hasilnya lebih lambat. Keduanya sama-sama efisien dalam konteks masing-masing.
Kecukupan	1–5	5	3	Tukar Sembako langsung menyasar akar masalah: rendahnya motivasi warga. Edukasi hanya meningkatkan kesadaran, tetapi tidak langsung mengurangi sampah.
Kesetaraan	1–5	5	4	Tukar Sembako dapat diikuti semua warga tanpa batasan. Edukasi bisa tidak merata karena tingkat partisipasi tiap RT berbeda.
Responsivitas	1–5	5	3	Tukar Sembako sangat menjawab kebutuhan ekonomi warga serta masalah sampah. Edukasi lebih bersifat sosial sehingga respons warga lebih lambat.
Kepantasan (Appropriateness)	1–5	4	5	Edukasi lebih cocok untuk tujuan jangka panjang dan membangun budaya bersih. Tukar Sembako tepat untuk solusi cepat, tetapi berorientasi hasil jangka pendek.
Total Skor		28	22	

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel tersebut, alternatif kebijakan **Program Sampah Tukar Sembako** memperoleh skor total tertinggi dibandingkan alternatif **Program Edukasi Lingkungan dan Kompetisi RT Bersih.** Keunggulan utama alternatif pertama terlihat pada kriteria efektivitas, kecukupan, dan responsivitas, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini dinilai paling mampu menjawab permasalahan pengelolaan sampah dan banjir secara langsung serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Sub DAS Bendung Sekip Jaya. Sementara itu, Program Edukasi Lingkungan dan Kompetisi RT Bersih memperoleh skor yang relatif lebih rendah karena dampaknya cenderung bersifat jangka panjang dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan perubahan nyata. Dengan demikian, hasil penilaian ini menegaskan bahwa kebijakan berbasis insentif ekonomi lebih relevan untuk diterapkan sebagai prioritas dalam penanganan permasalahan sampah dan banjir di lokasi penelitian.

Berdasarkan alternatif kebijakan yang dipilih, implementasi **Program Sampah Tukar Sembako** memerlukan perencanaan tindakan (action plan) yang terstruktur agar kebijakan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat lokal. Action plan disusun untuk memastikan bahwa setiap tahapan kebijakan berjalan secara sistematis, mulai dari persiapan hingga evaluasi, dengan melibatkan aktor yang relevan sesuai kewenangannya. Tahap awal implementasi diawali dengan **persiapan dan sosialisasi program** kepada masyarakat di wilayah Sub DAS Bendung Sekip Jaya. Pada tahap ini, pemerintah kelurahan bersama Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam menyampaikan tujuan program, mekanisme penukaran sampah, jenis sampah yang dapat disetorkan, serta manfaat yang akan diterima masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman dan penerimaan publik, sehingga program tidak dipersepsikan sebagai kebijakan top-down semata, melainkan sebagai upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Tahap berikutnya adalah **pelaksanaan pengumpulan dan penukaran sampah**. Masyarakat didorong untuk memilah sampah anorganik dari sumber rumah tangga dan menyetorkannya ke Drop-off Point (DOP) yang telah ditentukan di tingkat RT atau RW. Sampah yang terkumpul kemudian dicatat dan ditukarkan dengan paket sembako sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, peran kader lingkungan atau pengelola DOP menjadi krusial dalam menjaga transparansi, ketertiban administrasi, serta konsistensi pelaksanaan program di lapangan. Setelah sampah terkumpul, tahap selanjutnya adalah **pengelolaan dan penyaluran sampah** ke bank sampah atau mitra pengelola daur ulang. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam memastikan bahwa sampah yang dikumpulkan tidak kembali menjadi beban lingkungan, tetapi benar-benar masuk ke rantai pengelolaan yang sesuai dengan prinsip 3R. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya berfungsi sebagai alat insentif sosial, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pengurangan timbulan sampah dan tekanan terhadap sistem drainase.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan program, dilakukan **monitoring dan evaluasi secara berkala.** Evaluasi difokuskan pada tingkat partisipasi masyarakat, volume sampah yang berhasil dikumpulkan, serta dampaknya terhadap kebersihan lingkungan dan saluran air. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan, baik dari sisi mekanisme insentif, perluasan cakupan wilayah, maupun penguatan kapasitas pengelola di tingkat lokal. Implementasi kebijakan ini menuntut adanya **pembagian peran yang jelas antaraktor**. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan fasilitator, kelurahan sebagai koordinator pelaksanaan di tingkat lokal, masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan sampah, serta mitra swasta atau CSR sebagai pendukung pendanaan dan logistik. Sinergi antaraktor menjadi kunci keberhasilan implementasi, karena kebijakan berbasis partisipasi masyarakat tidak dapat berjalan secara efektif tanpa dukungan lintas sektor. Sebagai langkah selanjutnya, kebijakan **Program Sampah Tukar Sembako** perlu diintegrasikan dengan program pengelolaan sampah yang telah ada, seperti bank sampah dan edukasi lingkungan. Integrasi ini bertujuan untuk mencegah ketergantungan jangka panjang terhadap insentif ekonomi semata dan secara bertahap mengarahkan masyarakat pada perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. Selain itu, hasil implementasi program dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan lanjutan atau memperluas program ke wilayah Sub DAS lain yang memiliki karakteristik permasalahan serupa. Dengan action plan dan implementasi yang terencana, kebijakan ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi sampah yang masuk ke saluran air dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat tata kelola pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai bagian dari strategi penanganan banjir yang lebih berkelanjutan di Kota Palembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan banjir dan genangan di kawasan Sub DAS Bendung Kelurahan Sekip Jaya tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam maupun keterbatasan infrastruktur drainase, melainkan sangat dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penumpukan sampah anorganik di saluran air dan badan sungai secara signifikan menurunkan kapasitas aliran, mempercepat sedimentasi, dan pada akhirnya memicu terjadinya banjir meskipun intensitas curah hujan berada pada kategori sedang. Temuan ini menegaskan bahwa banjir di kawasan perkotaan merupakan hasil dari interaksi antara perilaku sosial masyarakat dan lemahnya pengelolaan lingkungan.

Analisis kebijakan publik yang dilakukan menunjukkan bahwa pendekatan teknis semata, seperti pengerukan saluran dan perbaikan drainase, tidak cukup efektif apabila tidak diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua alternatif kebijakan, yaitu Program Sampah Tukar Sembako dan Program Edukasi Lingkungan dan Kompetisi RT Bersih. Hasil evaluasi menggunakan kriteria Dunn (2018) menunjukkan bahwa Program Sampah Tukar Sembako memperoleh skor tertinggi dan dinilai lebih efektif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Kebijakan berbasis insentif ekonomi ini terbukti lebih relevan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka pendek dan berpotensi menekan masuknya sampah ke sistem drainase secara cepat.

Meskipun demikian, kebijakan berbasis insentif tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi jangka panjang. Keberlanjutan penanganan banjir dan pengelolaan sampah di kawasan Sub DAS Bendung Kelurahan Sekip Jaya tetap memerlukan penguatan kesadaran lingkungan melalui edukasi dan pembentukan budaya bersih secara kolektif. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan insentif ekonomi dan program edukasi lingkungan menjadi strategi yang penting untuk memastikan perubahan perilaku masyarakat yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam upaya mitigasi banjir perkotaan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 6 dan SDG 11, di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, F. M. (2025). Banjir Palembang Mulai Surut, BPBD dan Pemkot Petakan Titik Genangan. *IDN TIMES SUMSEL*.

Anthony, S., Iriani, A., Febriyanti, D., & Zubaidah, S. (2025). *Adaptasi Sosial dan Strategi Komunitas dalam Merespons Banjir di Wilayah Urban Palembang (Studi Kasus di Kecamatan Kemuning (Kelurahan 20 Ilir D-II, Ario Kemuning, Pahlawan, Pipa Reja, Sekip Jaya, dan Talang Aman)*. https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i5

Darniyus, A.-A., Widia, J., & Arjani Manik, Y. K. (2025). KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI DAERAH ALIRAN SUNGAI: SUATU KAJIAN LITERATUR. *Responsive*, *8*(3), 571–583. https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.65971

Dunn, W. n. (2018). *Public Policy Analysis an Integrated Approach*.

Edison, Banuwa, I. S., Yuwono, S. B., Damai, A. A., Hidayat, K. F., Suroso, E., & Hasani, Q. (2025). Institutional Analysis of Sustainable Management of the Sekampung Watershed, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Sylva Lestari*, *13*(1), 173–189. https://doi.org/10.23960/jsl.v13i1.1041

Firdaus, V., Setiyono, W. P., Oetardjo, M., Denisa,), Syahputri, F., & Maulidyah, N. L. (2023). *Knowledge sharing dan Self Awarness Guna Kebersihan Lingkungan*.

Hartati. (2025). Kondisi yang Terjadi di Palembang Bukan Banjir, Tapi Hanya Genangan, PUPR Beri Penjelasan. *Tribun Sumsel*. https://sumsel.tribunnews.com/palembang/997935/kondisi-yang-terjadi-di-palembang-bukan-banjir-tapi-hanya-genangan-pupr-beri-penjelasan

Irawanti, T., Riska, M., & Santosa, H. R. (2013). *COMMUNITY PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT THROUGH SURABAYA GREEN AND CLEAN PROGRAM* (Vol. 12, Issue 2).

Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, *12*(5), 40. https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40

Juwana, I., Sodri, A., Muttil, N., Hikmat, R. R., Indira, A. L., & Sutadian, A. D. (2024). Potential Pollution Loads of the Cikembar Sub-Watershed to the Cicatih River, West Java, Indonesia. *Water (Switzerland)*, *16*(2). https://doi.org/10.3390/w16020256

Nurikhsan, F. (2025). *Tradisi Jumat Berkah di Krobokan Semarang, warga tukar sampah dengan sembako.* https://regional.espos.id/tradisi-jumat-berkah-di-krobokan-semarang-warga-tukar-sampah-dengan-sembako-2114565

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga., BPK RI (2020).

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, BPK RI (2012).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, JDHI KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI (2012).

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, BPRK RI (2015).

Pramana, I. (2025). Hujan semalaman, Kota Palembang dikepung banjir. *ANTARA NEWS*.

Putri, A. D. (2025). *PEMETAAN AREA RAWAN BANJIR DI SUB DAS BENDUNG PALEMBANG*.

Rahalsyah Putra, J., Saggaff, A., Setiadi Moerwanto, A., Muhammad Aminuddin, K., Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, B., Ilmu Teknik, M., Doktor, P., Teknik, F., & Sriwijaya, U. (2023). Study of the Palembang City Watershed Sub-Flood System's Management Priority Scale. *JCEBT*, *7*(1). http://ojs.uma.ac.id/index.php/jcebt

Rakyat Pembaruan. (2025). Thamrin Group Gelar Aksi Nyata Bersih Bersih Sungai Sekip Bendung, Kumpulkan 3 Ton Sampah. *Koran Rakyat Pembaruan*.

Siregar, S. M., Sakir, M. I., Helmizuryani, S., Nurul, A., & Saleh, E. (2019). *Pengelolaan Rawa Perkotaan (Kasus Banjir Di Kota Palembang)*.

Smith, N. (2006). *There's No Such Thing as a Natural Disaster*. http://understandingkatrina.ssrc.org/Smith/

Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, BPK RI (2018).

Widyawati, R., & Putra Usman, A. (2025). Mapping of Flood Potential in Urban Areas in Kemuning District, Palembang City and its Surroundings. In *Jurnal Indonesia Sosial Sains* (Vol. 6, Issue 6). http://jiss.publikasiindonesia.id/